

**BAB IV**

**ANALISIS KEPENTINGAN RRT DALAM MENDUKUNG**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP**

**ROHINGYA**

Pada bab terakhir, akan memaparkan mengenai hasil temuan-temuan dari penulisan skripsi ini. Pada bab analisis, peneliti akan membagi kedalam enam sub-bab. Pertama, peneliti akan sedikit membahas mengenai contoh kerjasama RRT dan Myanmar dalam bidang ekonomi dan politik sebagai gambaran kedekatan kedua negara. Setelahnya peneliti akan menjelaskan dukungan RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar. Kemudian akan memaparkan kepentingan-kepentingan RRT yang ada di Myanmar dalam bidang ekonomi dan politik diikuti dengan bukti-bukti dari dua kepentingan tersebut. Terakhir, akan menjelaskan hasil analisa dengan menggunakan *Rational Choice Theory* atau Teori Pilihan Rasional untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti.

Teori Rational Choice merupakan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai bagaimana mengambil sebuah keputusan untuk mencapai tujuan tertentu secara maksimal. Dalam konteks negara biasanya keputusan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan tertentu atau berdasarkan dari kepentingan negara dengan melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan demi mendapatkan keuntungan yang maksimal baik yang bersifat politis maupun tidak (Arjawa, 2014, p. 51). Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus berdasarkan *cost and benefit*. Selain itu, peneliti juga akan menuliskan bagaimana hambatan-hambatan yang

dialami oleh RRT dalam menjalankan kepentingannya di Myanmar. Sehingga peneliti akan lebih menekankan penggunaan variabel *cost and benefit* sebagai kesesuaian antara pembahasan dengan penggunaan teori, setelah itu peneliti juga akan menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan RRT dalam menjalankan kepentingannya di Myanmar.

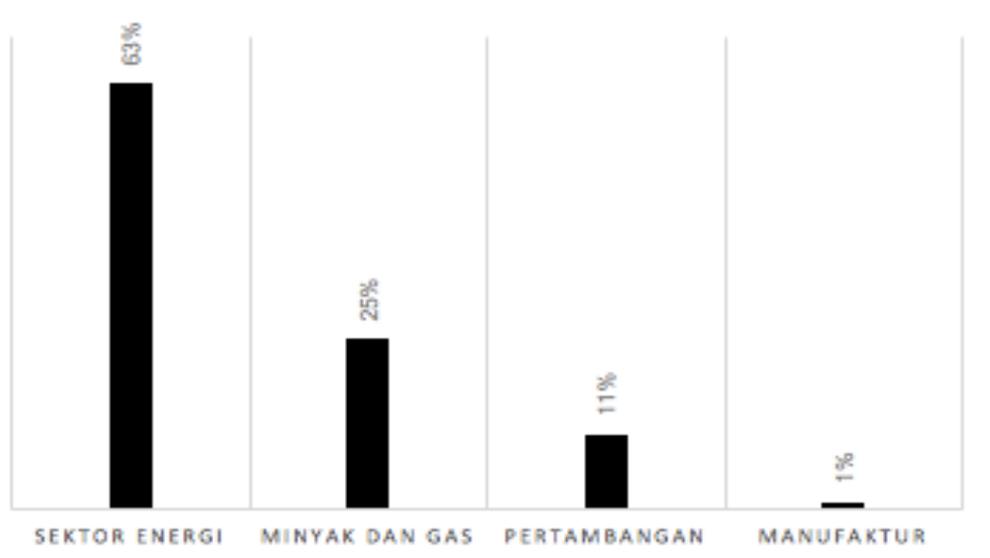
#### **4.1 Contoh Kerjasama RRT-Myanmar dalam Bidang Ekonomi**

Sebagai negara yang memiliki cadangan gas, minyak, serta memiliki bahan-bahan tambang yang cukup melimpah, hal ini membuat negara Myanmar sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang cukup dilirik oleh RRT. Dengan adanya keunggulan yang dimiliki negara Myanmar membuat RRT tertarik untuk melakukan kerjasama ekonomi antara keduanya. Terlebih, pada tahun 1988, pemerintah Myanmar telah mengeluarkan kebijakan liberalisasi perdagangan untuk menarik FDI sehingga RRT memanfaatkan momen tersebut untuk dapat menjalin kerjasama ekonomi (Gillan, 2009, pp. 36-37).

Dengan kondisi negara yang kaya akan sumber daya alamnya, kurangnya pesaing, serta lokasi Myanmar yang strategis untuk menjangkau wilayah Timur Tengah merupakan alasan mengapa RRT tertarik untuk menanam investasi langsung. Pada tahun 2009 silam. Berdasarkan pada data statistik dari kedutaan Myanmar, pada tahun 2011 investasi RRT di Myanmar tercatat sekitar 63% dalam sektor energi sementara itu, pada sektor-sektor lainnya seperti minyak dan gas tercatat sebesar 25%, pertambangan sebesar 11%, sedangkan manufaktur hanya menduduki angka 1%. Jika ditotalkan secara keseluruhan ketiga sektor tersebut mencapai angka 36%, lebih kecil dibandingkan dengan sektor energi yang

mencapai angka 63% (Dunn C. , 2016, pp. 5-7). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

**Diagram 4.1 Investasi RRT di Myanmar (2011)**



**Sumber :** sumber di modifikasi dari (Dunn C. , 2016, p. 7)

Pada tahun 2012, RRT tercatat sebagai salah satu investor terbesar di Myanmar dan diikuti oleh negara-negara lain seperti Thailand, Hong Kong dan Korea Selatan. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1 Sumber FDI di Myanmar (2012)**

Countries	Investment Capital (US\$ million)	Share of total FDI (%)
People's Republic of China	14,143	34,4
Thailand	9,568	23,3
Hong Kong	6,372	15,5
South Korea	2,959	7,2

**Sumber :** (Universe Logistics Group, 2016)

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa RRT adalah negara dengan FDI terbesar dan menduduki urutan pertama dengan total investasi sebesar US\$ 14.143 juta dan total FDI sebesar 34.4%. Sedangkan investor terbesar kedua diduduki oleh negara Thailand dengan total investasi US\$ 9.568 juta dengan total FDI sebesar 23.3% ditahun yang sama. Kemudian, kedudukan ketiga diikuti oleh Hong Kong dengan total investasi sebesar US\$ 6.372 juta dan total FDI sebesar 15.5%. Kedudukan keempat diisi oleh Korea Selatan dengan total investasi sebesar US\$ 2.959 juta dengan total FDI sebesar 7.2% (Universe Logistics Group , 2016).

Pada tahun 2013, RRT telah menanamkan investasi sebesar US\$ 14.1 miliar untuk menjalankan proyek-proyek yang ada di Myanmar, salah satu proyek terbesar RRT di Myanmar yakni bendungan Myitsone. RRT telah mendominasi penanaman modal asing dalam sektor energi seperti minyak, gas, listrik serta investasi pertambangan. Selain itu, sedikitnya kurang lebih 69 perusahaan dari RRT seperti China National Petroleum Corporation (CNPC), China Power Investment (CPI), China North Industries Corporation (NORINCO), dan Sinohydro Corporation telah terlibat dalam pembuatan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air, minyak, pertambangan, dan gas alam (IHLO, 2014).

RRT memanfaatkan posisinya sebagai investor utama di Myanmar untuk mendapatkan kepentingan strategis di wilayah Samudera Hindia. RRT juga mengambil saham sebesar 85% di pelabuhan Kyaukphyu yang merupakan pelabuhan utama Myanmar untuk dapat melancarkan jalannya proyek RRT. RRT memanfaatkan pelabuhan tersebut sebagai salah satu akses penting dalam investasi infrastruktur untuk memperdalam hubungan ekonomi RRT di seluruh wilayah Asia dan diluar Asia. RRT memanfaatkan pelabuhan Kyaukphyu sebagai pintu gerbang

dari pembangunan proyek pipa minyak dan gas yang nantinya akan terhubung hingga wilayah Kunming di RRT. Selain itu, untuk memperluas pengaruh geopolitik RRT ke wilayah Samudera Hindia maka dibutuhkan stabilitas kawasan negara Myanmar bagian Rakhine. RRT sejauh ini juga terkesan tidak ingin terlibat secara langsung dalam permasalahan Rohingya, karena tindakan ini bisa saja menjadi hambatan bagi RRT (The Irrawaddy, 2017).

#### **4.2 Contoh Kerjasama RRT-Myanmar dalam Bidang Politik**

Selain dalam bidang ekonomi, RRT-Myanmar juga mempunyai kerjasama dalam bidang politik, kerjasama ini sangat berkaitan dengan permasalahan etnis Rohingya di Myanmar. Myanmar melakukan negosiasi dengan RRT untuk cegah Draft Resolusi yang dikeluarkan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait permasalahan Rohingya. DK PBB merupakan sebuah badan utama dalam PBB yang dibentuk pada tahun 1945 (United Nations Foundation , 2013). Dalam DK PBB ini terdapat lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Adapun negara-negara yang termasuk kedalam anggota lima anggota tetap DK PBB yakni RRT, Perancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Setiap anggota memiliki satu suara, namun berbeda dengan lima anggota tetap, lima anggota tetap DK PBB memiliki hak veto. Hak veto merupakan sebuah suara negatif yang memungkinkan lima anggota tersebut dapat mencegah draft resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Pada umumnya, hak veto ini digunakan untuk melakukan kepentingan nasional negara anggota tetap untuk menegakkan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri mereka (Security Council Report, 2018).

Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dibawah mandat Pasal 6 dan pasal 8 Piagam PBB pada tahun 1945 telah menyebutkan bahwa PBB memiliki tanggung jawab untuk melindungi sebuah populasi dari kejahatan manusia di mana populasi tersebut berasal dari negara anggota PBB. Majelis Umum PBB menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut dengan mendesak pemerintah Myanmar untuk segera memberhentikan kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya. Majelis Umum PBB telah melakukan sebuah usaha untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya dengan membahas draft resolusi melalui DK PBB (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner , 2017). Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Majelis Umum PBB mengeluarkan dua draft resolusi, yang *pertama* adalah nomor S/2007/14 pada tanggal 12 Januari 2007. Draft resolusi tersebut berisi mengenai desakan Majelis Umum PBB kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan serangan militer terhadap warga sipil yang tinggal diwilayah pemukiman etnis minoritas. Khususnya untuk mengakhiri adanya pelanggaran hak-hak kemanusiaan terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh angkatan bersenjata. Draft tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah Myanmar harus mengizinkan organisasi kemanusiaan internasional untuk dapat beroperasi dalam mengatasi kebutuhan etnis minoritas tanpa ada hambatan apapun (United Nations Security Council , 2007). Draft resolusi yang *kedua* yakni, Dewan HAM PBB dalam membuat tim pencari fakta atas konflik Rakhine pada tanggal 26 Maret 2017. Adapun guna dari tim pencari fakta ini adalah untuk mencari mengenai fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine. Ketika fakta-fakta pelanggaran HAM tersebut ditemukan maka tim pencari fakta

ini menjamin adanya pertanggungjawaban dari pelaku serta menjamin adanya keadilan bagi korban konflik (United Nations Human Rights Council , 2018).

Myanmar mengandalkan posisi RRT sebagai anggota tetap DK PBB dan pemegang hak veto untuk menggagalkan draft resolusi yang dibahas oleh Majelis Umum PBB mengenai krisis Rohingya (Asia News , 2017). Hingga pada akhirnya, RRT menggunakan hak vetonya untuk mencegah draft resolusi yang dibahas Majelis Umum PBB untuk Myanmar dengan alasan demi stabilitas kawasan Myanmar. Namun, seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada umumnya lima anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya untuk kepentingannya sendiri, sehingga RRT disinyalir memiliki kepentingan dalam menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan draft resolusi terhadap Myanmar. Motif RRT dalam menggagalkan draft resolusi ke Myanmar tidak lain adalah untuk memperluas pengaruhnya di Myanmar, tindakan ini sekaligus bertujuan untuk membatasi pengaruh AS yang menyebar di negara-negara Asia. Sehingga, dengan melindungi Myanmar dari draft resolusi Majelis Umum PBB, RRT mendapatkan keuntungan tersendiri dalam mempertahankan pengaruhnya pada negara-negara tetangga dengan cara membatasi pengaruh AS yang telah menyebar (Balachandran, 2017).

### **4.3 RRT Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya**

Jika melihat kembali asal usul Rohingya dapat diketahui bahwa etnis Rohingya telah lama tinggal selama berabad-abad di Myanmar bahkan sebelum kemerdekaan Myanmar. Namun, keberadaan mereka justru tidak tercatat sebagai etnis lokal di Myanmar. Penderitaan yang dirasakan Rohingya tidak hanya datang dari penduduk setempat, sikap pemerintah Myanmar juga berlaku demikian. Pemerintah

Myanmar justru melegalkan tindakan yang dilakukan secara diskriminatif kepada etnis Rohingya (Amnesty International UK, 2017). Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti pada dua yakni mengenai kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingnya terdapat beberapa kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Kebijakan tersebut diantaranya adalah kebijakan penolakan kewarganegaraan, kebijakan pembatasan hak sosial yang meliputi pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, serta pembatasan hak untuk beribadah. Selain itu, kebijakan lain yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya yakni kebijakan pembatasan akses pendidikan dan kesehatan dan yang terakhir kebijakan pengusiran.

Melihat dari kebijakan pemerintah Myanmar yang bersifat diskriminatif ini tentu mendapatkan banyak pertentangan dari dunia internasional. Bahkan PBB sangat menyayangkan atas tindakan yang diberikan pemerintah Myanmar untuk Rohingya, PBB menginginkan bahwa tindakan tersebut dapat segera dihentikan (Deutsche Welle , 2018). Namun, RRT memiliki sikap yang berbeda dari negara-negara lainnya, RRT justru mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Geng Shuang sebagai juru bicara Kementrian Luar Negeri RRT yang menyatakan bahwa:

*“We support Myanmar’s efforts in upholding peace and stability in Rakhine state. We hope order and the normal life there will be recovered as soon as possible”* (The Straitstimes, 2017).

Kemudian, Geng Shuang menambahkan bahwa, melalui kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk menjaga stabilitas negaranya (The Straitstimes, 2017).

Hong Liang, sebagai duta besar RRT ke Myanmar juga menyampaikan pesan dukungannya terhadap pemerintah Myanmar bahwa sikap yang dilakukan oleh RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya merupakan hal yang cukup jelas. Permasalahan Rohingya merupakan permasalahan internal negara Myanmar, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut RRT tidak mempermasalahkan langkah yang telah diambil oleh pemerintah Myanmar, sehingga RRT pun mendukung hal tersebut demi menjaga keamanan negara Myanmar itu sendiri (The Global New Light of Myanmar , 2017). Adapun upaya yang diberikan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya yaitu dengan membentengi Myanmar dari sanksi PBB seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya terkait RRT memveto draft resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB terhadap Myanmar. Upaya tersebut dilakukan agar kepercayaan Myanmar terhadap RRT tetap terjaga.

#### **4.4 Kepentingan Ekonomi RRT di Myanmar**

Motif RRT terhadap Myanmar dil balik konflik Rohingya ini sangat terlihat ketika RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Disaat dunia internasional mengecam kebijakan pemerintah Myanmar yang menjurus pada pemusnahan massal tersebut hal yang berbeda ditunjukkan oleh RRT. RRT justru mendukung atas kebijakan tersebut dengan alasan demi menjaga stabilitas kawasan negara Myanmar. Dalam melancarkan proses kepentingannya di Myanmar, RRT membutuhkan kondisi negara Myanmar yang stabil agar kepentingan-kepentingannya di Myanmar tetap berjalan dengan lancar. Dengan adanya konflik Rohingya, membuat kondisi negara Myanmar tidak stabil. Konflik Rohingya

menjadi hambatan tersendiri bagi RRT dalam menjalankan kepentingannya. Sehingga, dengan mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, RRT bertujuan untuk melancarkan proyek pembangunan pipa minyak dan gas sebagai kepentingan utama ekonomi RRT di wilayah Rakhine.

#### **4.4.1 Proyek Pipa Minyak dan Gas**

Kerjasama bilateral antara RRT dan Myanmar berhasil dijalin melalui pembangunan jalur pipa minyak dan gas yang disepakati oleh perusahaan Cina National Petroleum Corporation (CNPC) dengan perusahaan minyak Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Kerjasama ini disepakati pada tahun 2009 dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan proyek jalur pipa minyak dan gas yang direncanakan akan dibangun dari pelabuhan Kyaukphyu. Pipa ini dirancang untuk dapat mengangkut sebanyak 22 juta ton minyak pertahunnya. Total investasi yang ditanamkan oleh RRT dalam proyek jalur pipa minyak dan gas ini menghabiskan dana sebesar US\$ 2,45 miliar (Shin, 2017).

Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini akan berjalan selama 30 tahun. CNPC sebagai perusahaan dari RRT memegang saham sebesar 51% sementara MOGE perusahaan Myanmar hanya memegang sebesar 49%. Sehingga proyek ini didominasi oleh perusahaan RRT. Adapun rencana pembangunan pipa gas dan minyak dimulai dari pelabuhan Kyaukphyu, Myanmar menuju wilayah Kunming di RRT dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 4.1 Jalur Pipa Minyak dari Myanmar ke RRT**



**Sumber :** (Srinivas, 2014, p. 593)

RRT memiliki tujuan tersendiri dalam membangun pipa gas dan minyak, diantaranya yaitu untuk menghemat biaya dan waktu dalam pengiriman minyak mentah tersebut. Sebelumnya pengiriman minyak mentah harus melewati jalur laut perairan Indonesia. Pembangunan ini tentunya berdampak pada perubahan rute pengiriman untuk menghindari kemacetan yang sering terjadi di Selat Malaka. Jauhnya rute pengiriman membuat RRT harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk transportasinya. Sehingga dengan dibuatnya jalur pipa gas dan minyak ini cukup menghemat biaya pengeluaran dalam pengiriman minyak mentah dengan memotong wilayah Myanmar menuju RRT dengan melewati daerah-daerah seperti Mandalay dan Naypyidaw seperti pada gambar dibawah ini:

**Gambar 4.2 Jalur Pelayaran RRT**



**Sumber:** (Corridor of Power : China's Trans-Burma Oil and Gas Pipelines ,  
2009, p. 9)

Keuntungan yang didapat dari Jalur pipa minyak dan gas ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi lokal di Propinsi Yunnan. Dengan adanya pembangunan pipa tersebut membuat pengiriman pasokan minyak menjadi lebih cepat dan murah karena dikirim langsung ke wilayah Kunming. Sebelumnya pasokan minyak ini tergolong sangat terbatas dan membutuhkan biaya pengiriman yang cukup mahal (Mitchell, 2012, pp. 48-49). Oleh karena itu pembangunan pipa ini memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan ekonomi RRT. Dari kerjasama proyek pembangunan ini, negara Myanmar memiliki posisi yang cukup penting sebagai jembatan yang menghubungkan masuknya pasokan energi minyak dan gas ke RRT

terutama pada wilayah Rakhine. Rakhine merupakan wilayah sebagai pintu masuk jalur pipa tersebut dari lautan Hindia karena letaknya yang langsung berhadapan dengan lautan Hindia. Untuk itu, pemerintah Myanmar harus menjamin bahwa wilayah Rakhine merupakan wilayah yang aman demi kelancaran proses pembangunan proyek tersebut. Selanjutnya, selain kepentingan jalur pipa minyak dan gas sebagai kepentingan utama RRT juga memiliki kepentingan lain seperti pertambangan dan pembangkit listrik tenaga air.

#### **4.5 Kepentingan Politik RRT di Myanmar**

RRT merupakan sekutu Myanmar dan memiliki pengaruh yang besar terhadap Myanmar. Sebagai negara yang bersekutu, RRT tidak memberikan atau melakukan tindakan perlawanan terhadap pemerintah Myanmar dalam isu Rohingya. RRT hanya memberikan dukungan yang positif atas tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya tanpa terlibat langsung dalam permasalahan Rohingya maupun terlibat langsung dalam membuat kebijakan tersebut. Dunia internasional menganggap bahwa RRT telah mengabaikan krisis Rohingya yang terjadi di wilayah Rakhine dan sikap yang ditunjukkan oleh RRT semata-mata dilakukan demi melindungi kebijakan-kebijakan kerjasama RRT di Myanmar.

Hal berbeda ditunjukkan oleh negara *super power* yakni AS. Sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam HAM, AS sangat mengkhawatirkan adanya tindakan diskriminasi yang terjadi pada etnis minoritas di Myanmar. Tidak hanya itu AS juga menuntut bahwa kekerasan tersebut harus segera dihentikan. Kecaman AS terhadap krisis Rohingya di Rakhine ini didukung

dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson yang menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi pada warga Rohingya di Rakhine harus segera dihentikan, apalagi kekerasan tersebut menyebabkan isu *ethnic cleansing* (South China Morning Post, 2017).

AS telah mengambil sikap dan berpihak pada Rohingya, namun disisi lain AS juga khawatir dampak yang akan terjadi terhadap bisnis AS di Myanmar apabila AS terlalu mendesak Myanmar dan terlalu mencampuri permasalahan negara lain. Adapun dampak yang dikhawatirkan oleh AS yaitu kehilangan kontrak bisnis, investasi, dan peluang pasar di Myanmar. Selain itu, pengaruh AS dikhawatirkan akan berkurang, sehingga perusahaan-perusahaan dari RRT dapat memanfaatkan peluang dalam penurunan dari pengaruh AS di Myanmar (Corr, 2016).

Menurunnya pengaruh AS di Myanmar dapat membuat pengaruh RRT di Myanmar semakin besar. Terlebih sikap RRT untuk tidak ikut campur dalam krisis Rohingya. RRT terlalu mendedikasikan dirinya untuk menjadi hegemoni global dengan cara RRT banyak melakukan kesepakatan perdagangan bilateral dengan negara-negara lain. Kemudian RRT juga berusaha untuk mencari sebuah kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian RRT dalam jangka waktu yang panjang. Salah satunya yaitu negara Myanmar yang memiliki cadangan energi yang dibutuhkan oleh RRT contohnya gas alam (Zhao, 2011, p. 92). Sikap RRT yang tidak terlibat sedikitpun dalam krisis Rohingya disinyalir untuk dapat mendominasi pengaruh di negara Myanmar. Maka secara tidak langsung, apabila RRT dapat mendominasi

pengaruh di Myanmar maka akan sangat mudah bagi RRT untuk dapat menguasai sumber energi yang ada di Myanmar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kepentingan politik RRT di Myanmar, dapat dibuktikan dengan sikap RRT dengan tidak ikut campur terhadap krisis Rohingya dikarenakan RRT sangat yakin bahwa Myanmar dapat menyelesaikan konflik internal negaranya tanpa harus ada ikut campur dari negara lain. Selain itu, RRT beranggapan bahwa campur tangan negara lain dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar tidak akan dapat terselesaikan. Dengan adanya campur tangan negara lain hanya akan memperumit permasalahan tersebut sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan permasalahan Rohingya (Coghill, 2017). Dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain, RRT memiliki prinsip untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain karena hal itu hanya akan merusak hubungan kerjasama yang telah dijalin. Sikap itulah yang diberikan RRT dalam menanggapi krisis Rohingya di Myanmar. Seperti yang telah diutarakan oleh Guo Yezhou sebagai Wakil Menteri Departemen Internasional Komite Sentral Communist Party of China (CPC) yang mengatakan bahwa berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, keterlibatan sebuah negara lain terhadap permasalahan domestic sebuah negara hanya akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari negara tersebut, sehingga RRT tidak ingin melakukan hal tersebut (CGTN , 2017). Alasan lain juga diungkapkan Guo Yezhou yang mengatakan bahwa ketidak terlibatan RRT dalam krisis Rohingya karena RRT tidak menginginkan ketidakstabilan Myanmar dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap negaranya. Sehingga RRT hanya mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Myanmar untuk menjaga kestabilan kawasannya (Dawn,

2017). Bagi RRT, krisis Rohingya bukanlah sebuah hambatan untuk dapat mencapai kepentingan negaranya, terlebih dalam kepentingan politik.

RRT merupakan salah satu negara besar yang cukup diperhitungkan di dunia internasional. Terutama dalam posisi kekuatan politik antara RRT dan AS yang menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dominasi RRT di Myanmar dapat dilihat dari permasalahan Rohingya, di mana negara AS mendesak dan mengecam perlakuan Myanmar terhadap Rohingya, sedangkan RRT justru bersikap sebaiknya. RRT menawarkan dukungan ekonomi dan politik dan menjalin hubungan baik terlepas dari permasalahan Hak Asasi Manusia yang mengganggu hubungan Myanmar dengan negara lainnya. Ditengah konflik Rohingya ini, pengaruh AS di Myanmar sangat berkurang sementara RRT dapat membuat Myanmar lebih condong ke RRT dan mulai meninggalkan AS (Pennington, 2017). Sehingga, menurunnya pengaruh AS merupakan sebuah peluang bagi RRT untuk dapat mendominasi pengaruhnya secara politik di Myanmar. Selain dominasi pengaruh RRT di Myanmar, Myanmar juga bergantung dengan RRT dalam bidang ekonomi. Contohnya, Myanmar mendapatkan bantuan rendah bunga sebesar US\$ 200 juta dari RRT yang akan digunakan untuk membeli alat dan mesin pertanian. Namun, dibalik bantuan tersebut RRT meminta hak-hak istimewa bagi perusahaan-perusahaan RRT yang berdiri di Myanmar (Linter, 2018).

RRT tidak hanya giat mendekati dirinya kepada Myanmar saja, dapat kita lihat bahwa RRT juga semakin giat dalam mendekati dirinya dengan Asia Tenggara. Dimulai dari hubungan politik yang fundamental sampai mengarah menjadi RRT sebagai pusat kekuatan ekonomi di Asia. Pertumbuhan ekonomi

RRT pada saat ini memang sangat menggiurkan. Oleh karena itu, tidak heran jika hampir semua negara-negara di Asia Tenggara memiliki hubungan ekonomi dengan RRT khususnya dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Hubungan ekonomi antara RRT dan Asia Tenggara merupakan hal yang sangat penting bagi RRT karena RRT membutuhkan jaminan bagi keberlangsungan sumber daya alam untuk kepentingan nasionalnya (Ah, 2017, p. 1). RRT berharap bahwa pada suatu saat negara-negara di Asia dapat berpihak pada RRT sebagai ‘pemimpin’ ketika terjadi sebuah konflik yang mengancam kawasan Asia. Untuk itu, RRT mengajak negara-negara ASEAN untuk dapat melakukan latihan militer bersama dengan kelompok regional Asia Tenggara yang bertempat di Laut China Selatan. Upaya yang dilakukan RRT disinyalir bahwa RRT sangat ingin dipandang sebagai ‘pemimpin’ dan ingin menggantikan peran AS dalam pengaturan keamanan kawasan (Nagai, 2018).

Selanjutnya, kepentingan lain RRT dalam bidang politik yaitu RRT mencari dukungan Myanmar untuk mendukung posisi RRT dalam isu Laut China Selatan dalam forum regional ASEAN. Dalam kasus Laut China Selatan, negara-negara ASEAN memiliki perselisihan wilayah utama dengan Laut China Selatan. Untuk itu, diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2014 di Myanmar merupakan harapan bagi RRT agar Myanmar sebagai tuan rumah tidak turut mempermasalahkan posisi RRT dalam permasalahan tersebut. Seperti yang telah dilakukan RRT terhadap isu Rohingya di Myanmar di mana RRT tidak mempermasalahkan bahkan mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sehingga RRT juga

berharap Myanmar dapat memberikan dukungannya di KTT ASEAN (Sun, 2012, p. 82).

Harapan RRT dalam mencari dukungan Myanmar untuk mendukung posisinya dalam isu Laut China Selatan pada KTT ASEAN 2014 dinyatakan langsung kepada pejabat Myanmar sebelum forum regional ASEAN yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2011. Myanmar merespon dengan baik dalam KTT ASEAN 2014 terkait harapan RRT dalam isu Laut China Selatan. Hal ini dibuktikan dengan sifat netral yang dibawa oleh Myanmar berdasarkan pada pertimbangan *geoeconomic* dan *geopolitic*. Selain itu, Myanmar juga akan mengusahakan mengenai solusi yang mudah diterima semua negara terkait permasalahan tersebut. Myanmar akan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang kode etik dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan sebagai tindakan pertamanya (Latt, 2013).

Selain itu, Myanmar juga berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui keterlibatan dan jalur negosiasi. Myanmar juga melihat bahwa RRT memiliki peran penting untuk pengembangan negara-negara ASEAN. Dengan menerapkan dan mempromosikan perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk antara ASEAN dan RRT berupa membangun infrastruktur investasi Bank Asia dan mempromosikan kerjasama keuangan. RRT juga mendukung adanya pertumbuhan dan keterlibatan ASEAN dalam kerjasama regional. Sehingga, Myanmar tidak menginginkan perselisihan yang terjadi antara negara-negara ASEAN dengan RRT akibat sengketa tersebut. Untuk itulah mengapa Myanmar tidak bersikap menentang RRT dalam forum regional KTT ASEAN yang dilaksanakan di Myanmar pada tahun 2014 (Shihong, 2015).

## 4.6 Analisis Pendekatan Rational Choice Theory (RCT)

Pada sub-bab terakhir peneliti akan menganalisis dengan menggunakan Rational Choice Theory (RCT) atau Teori Pilihan Rasional untuk melihat mengapa kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya melalui dua variabel yang saling berkaitan yaitu *cost and benefit* serta hambatan-hambatan RRT dalam menjalankan kepentingannya.

### 4.6.1 Cost

Dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, tindakan yang dilakukan oleh *rational actions* ini harus berdasarkan pada *cost* sebagai sebuah pertimbangan. Penerapan konsep *cost* ini berguna untuk dapat mengetahui lebih dalam terkait seberapa besar konsekuensi atau kerugian yang mungkin saja terjadi ketika melakukan sebuah pertimbangan. Untuk meminimalisir terjadinya resiko kerugian, *rational actions* biasanya membuat beberapa rencana dalam sebuah keputusan. Misalnya plan A dan plan B. Pada masing-masing rencana tersebut tentu memiliki resiko kerugian masing-masing. Namun, *rational action* biasanya lebih memilih rencana mana yang paling minim terjadinya resiko. Pada akhirnya *rational action* memilih salah satu dari plan tersebut sebagai tindakan yang paling minim resiko untuk dapat memperbesar sebuah keuntungan (Dompere, 2004, p. 132).

Seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya bahwa, RRT memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Myanmar. Perlu mengingat kembali bahwa dalam bidang ekonomi, RRT memiliki kepentingan berupa proyek pembangunan pipa minyak dan gas di wilayah Rakhine. Proyek pembangunan pipa minyak dan gas ini salah satu kepentingan utama RRT di Myanmar dalam bidang ekonomi. Proyek ini juga disebut-sebut sebagai kepentingan ambisius dan

memakan dana hingga triliunan untuk menjalankan proyek tersebut. Selain itu, kepentingan RRT dalam bidang politik di Myanmar adalah mengambil alih dan mendominasi pengaruh di Myanmar yang sebelumnya di dominasi oleh AS. Kemudian, RRT juga mencari dukungan Myanmar untuk mendukung posisi RRT dalam isu Laut China Selatan di ASEAN dalam forum regional yaitu KTT ASEAN yang diselenggarakan di Myanmar pada tahun 2014 silam. RRT berharap bahwa Myanmar sebagai tuan rumah tidak mempermasalahkan posisi RRT dalam sengketa tersebut dan mencari solusi lain disertai dengan persetujuan negara-negara ASEAN lainnya. Untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut RRT tentu saja memiliki strategi-strategi tersendiri dalam melakukan pendekatan dengan hubungan luar negeri.

Strategi RRT yang *pertama* dalam mengincar kepentingan nasionalnya di Myanmar yaitu melalui momen pemilu Myanmar pada tahun 2010. Menurunnya pengaruh RRT di Myanmar dibuktikan dengan adanya pemilu pertama Myanmar yang dilaksanakan pada tahun 2010. Tidak hanya penurunan dominasi yang mulai dimasuki oleh AS, pemilu tersebut juga berdampak pada hubungan kedua negara. Pada akhirnya RRT membuat strategi untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. Konsolidasi hubungan ini dilakukan RRT dengan cara meningkatkan kunjungan-kunjungan antar pemimpin negara untuk membahas mengenai investasi, perdagangan, dan peminjaman oleh kedua negara. Akan tetapi konsolidasi yang dilakukan oleh RRT ini terhambat karena keterbatasan pengaruhnya di Myanmar. Selain itu, kemunculan oposisi yang berpendapat bahwa RRT hanya ingin mengeksploitasi SDA di Myanmar yang dilakukan oleh perusahaan RRT. Sehingga, strategi ini dikhawatirkan hanya akan membuat ketegangan hubungan

antara kedua negara yang akibatnya akan berdampak ke perusahaan-perusahaan RRT yang telah berdiri di Myanmar. Terlebih RRT bertindak lebih agresif ketika pemilu 2010 dan kemunculan oposisi yang membuat sentimen anti RRT (International Crisis Group, 2010).

*Kedua*, RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di sub-bab sebelumnya bahwa dukungan RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar telah diutarakan oleh Geng Shuang sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT. Tidak hanya itu, dukungan yang diberikan secara lisan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT juga dibuktikan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar. Adapun upaya yang dilakukan oleh RRT adalah dengan membentengi Myanmar dari sanksi PBB yang diakibatkan oleh kebijakannya sendiri. Dalam strategi ini, RRT hanya mendapatkan kritikan secara tidak langsung dari AS. AS memberikan kritikan terhadap RRT karena dianggap telah melindungi Myanmar dari kecaman Majelis Umum PBB terkait tindakan militer Myanmar (Nichols, 2018).

Jadi, jika melihat dari kedua strategi tersebut di mana pada strategi pertama, RRT mendapatkan *cost* atau konsekuensi berupa kerenggangan hubungan RRT-Myanmar yang kemungkinan saja akan berdampak pada perusahaan-perusahaan RRT yang telah berdiri di Myanmar. Kemudian munculnya oposisi menyebabkan munculnya sentimen anti RRT di Myanmar. Pada strategi yang kedua yakni dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar, RRT hanya mendapatkan *cost* berupa kritikan yang dinyatakan secara tidak langsung oleh AS. Sebagai pertimbangan RRT lebih memilih strategi yang kedua yaitu dengan mendukung kebijakan

pemerintah Myanmar terhadap Rohingya karena dianggap lebih minim resiko dibandingkan strategi yang pertama.

#### **4.6.2 Benefit**

Berangkat dari strategi RRT dalam mencapai kepentingan-kepentingannya di Myanmar membuat RRT memilih strategi untuk mendukung kebijakan pemerintah Myanmar sebagai salah satu strategi yang dianggap paling minim resiko namun dapat memaksimalkan keuntungan. Mengingat kembali bahwa kepentingan utama RRT dibidang ekonomi adalah proyek pembangunan pipa minyak dan gas. Sedangkan kepentingan utama dalam bidang politik yaitu RRT berusaha untuk mengambil alih dan mendominasi pengaruh di Myanmar. Ketika pengaruh RRT di Myanmar lebih mendominasi maka akan sangat mudah bagi RRT untuk mendapatkan kepentingannya. Dengan adanya kepentingan dalam bidang ekonomi dan politik yang kemudian membuat RRT memilih untuk menerapkan strategi mendukung kebijakan pemerintah Myanmar walaupun mendapatkan kritikan secara tidak langsung oleh AS. Namun, dengan mendukung kebijakan tersebut dapat membuktikan bahwa RRT dapat meraih kepentingan-kepentingannya di Myanmar.

*Benefit* yang didapatkan oleh RRT dalam bidang ekonomi dapat dibuktikan dengan adanya MoU untuk membangun proyek jalur pipa minyak dan gas yang telah disepakati oleh kedua negara. Dalam bidang politik, *benefit* yang dirasakan oleh RRT sejauh ini adalah dominasi pengaruh RRT di Myanmar karena RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar. Sedangkan AS memilih untuk pro terhadap Rohingya, karena alasan itulah yang membuat Myanmar berpaling dari AS dan lebih mengeratkan hubungan dengan RRT. Selain itu, Myanmar

mendukung posisi RRT dalam sengketa Laut China Selatan pada forum regional KTT ASEAN tahun 2014 yang diselenggarakan di Myanmar. Jadi, sejauh ini jika dilihat dari *benefit* yang didapatkan oleh RRT yang membuat RRT lebih memilih untuk tidak ikut campur urusan internal negara Myanmar dan mendukung segala tindakan pemerintah Myanmar untuk menjaga stabilitas negaranya. Atas dasar kepentingan-kepentingan tersebutlah yang menjadi dorongan bagi RRT untuk mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.

#### **4.6.3 Hambatan RRT Dalam Menjalankan Proyeknya di Myanmar**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua hambatan utama dalam penerapan RCT yaitu sumber daya alam dan institusi sosial. ***Pertama***, sumber daya alam dapat diartikan bahwa aktor yang membutuhkan lebih dari satu sumber daya yang berbeda, maka aktor tersebut juga membutuhkan biaya yang lebih untuk dapat membuat akses sumber daya yang berbeda. Sehingga aktor biasanya akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk itu. ***Kedua***, hambatan dari institusi sosial yang memiliki prinsip positif maupun negatif sehingga dapat mendorong bahkan mencegah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor. Untuk itu peneliti akan mencoba untuk mengaitkan konsep dua hambatan utama dalam RCT kedalam hambatan-hambatan yang dimiliki oleh RRT dalam menjalankan proyeknya di Myanmar. RRT memiliki enam hambatan utama dalam menjalankan proyek-proyeknya, terutama ketika pemerintah Myanmar mengalami masa transisi politik dari Junta militer menjadi lebih demokratis. Transisi politik tersebut tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan ekonomi maupun politik Myanmar yang nantinya akan menimbulkan resiko kepada RRT.

1. Dalam membangun pipa minyak dan gas RRT menanggung biaya yang cukup banyak. Biaya dalam membangun pipa minyak dan gas tersebut diperkirakan sebesar US\$ 5 miliar. Tidak hanya itu, pembangunan jalur pipa minyak tersebut menembus medan yang beragam seperti menembus daerah pegunungan yang melintang, melewati hutan-hutan, serta sungai dengan gelombang air yang sangat tinggi. Belum lagi rute pipa minyak dan gas tersebut melewati daerah konflik bersenjata, sehingga RRT khawatir atas keamanan pembangunan proyek ambisiusnya
2. Pembangunan proyek pipa minyak dan gas menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi tanah dan penggundulan hutan (deforestasi). Akibatnya banyak aksi protes yang dilakukan warga setempat karena dianggap hanya merugikan masyarakat setempat. Aksi protes tersebut juga menghambat jalannya pembangunan pipa minyak dan gas (Zhao, 2011, p. 92).
3. Apabila perusahaan RRT mengeksploitasi sumber daya alam di Myanmar secara berlebihan dengan tidak mempertimbangkan kerusakan lingkungan maka badan pengawas pembangunan tersebut akan meminta pemerintah Myanmar untuk menutup proyek tersebut. Akibatnya RRT harus mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku dan membayar lebih untuk melakukan perlindungan lingkungan (Isnarti, 2017, p. 200).
4. RRT dituntut untuk memperhatikan kondisi sosial dan masalah sosial yang diakibatkan dari pembangunan pipa tersebut dengan membayar kompensasi kerugian-kerugian yang diterima oleh masyarakat setempat.

5. Selain itu, hambatan RRT dalam menjalankan kepentingannya di Myanmar bisa saja datang dari negara luar. Misalnya persaingan dengan negara India untuk memperebutkan cadangan sumber daya energi yang dimiliki oleh Myanmar (Isnarti, 2017, pp. 202-204).
6. Karena berbagai budaya dan gaya hidup masyarakat Myanmar yang berbeda-beda membuat perusahaan RRT sulit untuk dapat menemukan pekerja lokal dari Myanmar yang memiliki kualitas yang baik dalam bekerja. Oleh karena itu, kesempatan bekerja di perusahaan RRT bagi masyarakat Myanmar sangat terbatas. Sehingga perusahaan-perusahaan RRT di Myanmar dianggap gagal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Sherpa, 2016, p. 67).

Jika hambatan-hambatan yang didapatkan RRT dalam menjalankan proyeknya dikaitkan dengan dua hambatan utama dalam RCT maka dapat disimpulkan bahwa pada poin sumber daya alam RRT harus mengeluarkan biaya lebih akibat dari proyek pembangun tersebut. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan poin 1, 3, dan 4 yang mengatakan bahwa RRT harus mengeluarkan biaya sekitar US\$ 5 miliar untuk biaya pembangunan proyek tersebut ditambah dengan kondisi akses yang sulit untuk dijangkau. RRT juga harus membayar lebih untuk biaya perlindungan lingkungan, dan membayar kompensasi kerugian-kerugian yang diterima oleh masyarakat Myanmar sebagai bentuk pertanggung jawaban. Kemudian pada poin hambatan yang kedua dalam RCT yaitu terdapat institusi sosial yang dapat mendorong atau mencegah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor. Pernyataan tersebut sesuai pada poin ke 5, di mana pada poin tersebut menyebutkan bahwa RRT khawatir akan adanya hambatan yang datang dari negara

luar. Salah satu contohnya adalah negara India. Mengingat India juga merupakan negara yang membutuhkan sumber daya energi untuk dapat memenuhi kebutuhan negaranya, terlebih lokasi negara India dan Myanmar yang berdekatan. Sehingga RRT-India saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya energi di Myanmar. Adanya kebijakan terkait kepentingan energi Myanmar dan kepentingan nasional RRT-India justru menyebabkan ketegangan diantara kedua negara tersebut. Sehingga RRT menganggap bahwa India merupakan salah satu ancaman untuk saling memperebutkan Myanmar, dan dapat menghambat kepentingan RRT di Myanmar (Panwar, 2009, pp. 1-2). Berikut poin-poin penjelasan variabel teori sebagai hasil dari penelitian:

**Tabel 4.2 Klasifikasi Variabel RCT terhadap pembahasan**

<b>Variabel</b>	<b>Deskripsi</b>
<i>Cost</i>	1. RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Strategi ini dianggap lebih minim resiko dan dapat memaksimalkan keuntungan bagi RRT.
<i>Benefit</i>	2. Ekonomi : a. Jalur pipa minyak dan gas. Jalur ini memberikan keuntungan bagi RRT dalam menghemat biaya dan waktu pengiriman minyak mentah. Selain itu, benefit

	<p>yang dirasakan yaitu RRT dapat meningkatkan perekonomiannya di propinsi Yunnan.</p> <p>Politik :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dominasi pengaruh kekuasaan di Myanmar.</li> <li>b. Dukungan Myanmar terhadap RRT dalam forum KTT ASEAN tahun 2014 di Myanmar terkait sengketa Laut China Selatan.</li> </ol>
<p>Hambatan-hambatan RRT</p> <p>Dalam Menjalankan Proyek Pipa Minyak dan gas</p>	<p>3. A. Pembengkakan biaya.</p> <p>Selain mengeluarkan biaya sebesar US\$ 5 miliar untuk proyek jalur pipa minyak dan gas tersebut, RRT juga harus membayar lebih untuk melalukan perlindungan lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya di Myanmar. Selain itu, RRT di tuntutan untuk membayar kompensasi kerugian-kerugian yang dirasakan oleh masyarakat setempat.</p> <p>B. RRT-India saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya energi yang ada di Myanmar, kemunculan India dianggap dapat menghambat ruang gerak RRT dalam menjalankan proyeknya.</p>